

## DETERMINASI RENDAHNYA PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNP DALAM PILKADA GUBERNUR SUMATERA BARAT 2024

Isratul Ilham Zet<sup>1(a)</sup>, Rizki Syafril<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang  
<sup>a</sup>isratulilhamzz@gmail.com, <sup>b</sup>rizkisyafri@fis.unp.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

20-05-2025

Diterbitkan Online:

30-09-2025

#### Kata Kunci:

Partisipasi Politik, Mahasiswa,  
Pilkada, Universitas Negeri  
Padang, Sumatera Barat.

#### Keywords:

Political Participation,  
Students, Elections, Padang  
State University, West  
Sumatra

#### Corresponding Author:

isratulilhamzz@gmail.com

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i3.1247>

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas partisipasi politik mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang (UNP) pada Pilkada Gubernur Sumatera Barat tahun 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam proses demokrasi, namun kenyataannya tingkat partisipasi mereka dalam pemilihan kepala daerah masih rendah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan survei online kepada mahasiswa aktif angkatan 2019–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 37,3% mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 62,7% memilih untuk golput. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu persoalan administrasi dan domisili bagi mahasiswa perantau, rendahnya kepercayaan terhadap politik akibat maraknya kasus korupsi dan politik uang, serta minimnya sosialisasi dan edukasi politik baik mencakup pembelajaran serta diskusi politik dari kampus maupun pihak terkait. Banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengurus surat pindah memilih, sehingga enggan untuk berpartisipasi. Selain itu, persepsi negatif terhadap politisi dan janji-janji yang tidak ditepati semakin memperkuat sikap apatis dan skeptis di kalangan mahasiswa.

### ABSTRACT

This research discusses the political participation of students of the State Administration Department of Padang State University (UNP) in the West Sumatra Governor Election in 2024. This research is motivated by the importance of the role of students as agents of change in the democratic process, but in reality their level of participation in regional head elections is still low. The research used qualitative methods with data collection techniques through interviews, observations, and online surveys to active students of the 2019-2024 batch. The results showed that only 37.3% of students exercised their voting rights, while 62.7% chose to abstain. This low participation is caused by several main factors, namely administrative and domicile issues for overseas students, low trust in politics due to rampant cases of corruption and money politics, and the lack of socialization and political education both from the campus and related parties. Many students experience difficulties in arranging a letter of transfer to vote, making them reluctant to participate. In addition, negative perceptions of politicians and unfulfilled promises further strengthen apathy and skepticism among students.

## PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana seluruh kekuasaan berasal dari rakyat secara utuh. Dalam praktiknya, demokrasi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung adalah sistem di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik tanpa perantara, sedangkan demokrasi perwakilan adalah sistem di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk mengambil keputusan politik atas nama mereka. Kata “demokrasi” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *dēmokratía*, yang berarti kekuasaan rakyat. Istilah ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *dēmos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau kekuatan. Konsep demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, yang menggambarkan sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat banyak. Konsep ini muncul sebagai respons dari masyarakat Athena yang ingin memberikan suara dan menyuarakan pendapat mereka secara lebih luas dalam pengelolaan negara.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, partisipasi politik mahasiswa memainkan peran yang sangat penting. Mahasiswa sering dianggap sebagai kelompok yang memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan sosial dan politik, khususnya di Indonesia. Sebagai generasi yang dianggap kritis dan progresif, mahasiswa tidak hanya sekadar menjadi pengamat, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam berbagai dinamika politik. Secara umum, partisipasi politik dapat dipahami sebagai segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh warga negara yang memiliki dampak terhadap dunia politik, baik dalam pengambilan keputusan, pengawasan, maupun dalam pengembangan kebijakan. Partisipasi politik memiliki peranan sentral dalam menentukan tingkat kualitas demokrasi suatu negara.

Salah satu bentuk partisipasi politik yang sangat penting adalah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada merupakan mekanisme yang digunakan oleh rakyat untuk mendelegasikan kedaulatan mereka kepada calon kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, agar dapat mengambil dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pilkada merupakan bagian

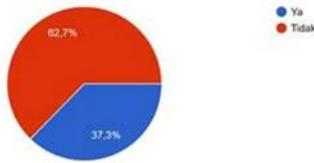
dari perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia yang mengadopsi prinsip otonomi daerah, yakni memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Pilkada dilakukan secara langsung oleh warga daerah administratif yang memenuhi syarat dan biasanya digelar secara serentak. Selain itu, pemilihan kepala daerah dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan wakil kepala daerah sebagai satu paket. Pengawas Pilkada memiliki kewenangan penting dalam menyelesaikan sengketa pemilihan dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 143 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015.

Secara khusus, Pilkada Gubernur di Sumatera Barat tidak hanya berfungsi sebagai ajang pemilihan pemimpin daerah, melainkan juga menjadi sarana penting bagi mahasiswa untuk mengekspresikan aspirasi mereka, menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik, dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. Partisipasi mahasiswa dalam Pilkada tersebut dapat berupa berbagai aktivitas, seperti memberikan suara dalam pemilihan, ikut serta dalam kampanye, mengadvokasikan isu-isu yang penting bagi masyarakat, serta mengikuti dan membedah visi dan misi calon-calon gubernur. Keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses ini menunjukkan tingkat kesadaran politik yang tinggi dan keinginan untuk ikut membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan demokratis.

Penulis juga telah melakukan survei terhadap persentase partisipasi mahasiswa aktif di Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang dari tahun 2019 hingga 2024, yang berjumlah sebanyak 1.419 mahasiswa. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa hanya 37,3% mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada, sementara 62,7% memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih (golput). Berbagai alasan mendasari keputusan golput ini, yang dapat berkaitan dengan kurangnya minat, ketidakpercayaan terhadap proses politik, hingga persepsi bahwa pilihan yang ada kurang mewakili aspirasi mereka.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat tingkat kesadaran politik yang cukup, tantangan dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa masih tetap ada dan perlu menjadi perhatian bersama.

apakah saudara ikut memilih pada Pilkada Sumatra Barat ?



**Gambar 1. Persentase mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara yang memilih dan tidak memilih di Google form**

Minimnya sosialisasi dan edukasi politik yang diberikan oleh kampus serta pihak-pihak terkait menjadi salah satu faktor utama rendahnya kesadaran dan partisipasi politik mahasiswa dalam Pilkada 2024. Sebagai institusi pendidikan, kampus seharusnya memiliki peran sentral dalam membekali mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya partisipasi politik, khususnya terkait hak suara dalam pemilihan umum. Namun, dalam kenyataannya, kampus kerap kali lebih menitikberatkan perhatian pada aspek akademik semata dan kurang aktif dalam memberikan pembekalan serta edukasi tentang dunia politik kepada mahasiswanya. Akibatnya, banyak mahasiswa yang belum memahami dengan baik bagaimana proses demokrasi berlangsung dan menganggap bahwa politik bukanlah hal yang relevan atau penting bagi kehidupan mereka. Kondisi ini menyebabkan rendahnya minat mahasiswa untuk terlibat aktif dalam Pilkada, sehingga partisipasi politik mereka menjadi sangat terbatas.

Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu persoalan administrasi dan domisili bagi mahasiswa perantau, rendahnya kepercayaan terhadap politik akibat maraknya kasus korupsi dan politik uang, serta minimnya sosialisasi dan edukasi politik baik mencakup pembelajaran serta diskusi politik dari kampus maupun pihak terkait. Banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengurus surat pindah memilih, sehingga enggan untuk berpartisipasi. Selain itu, persepsi negatif terhadap politisi dan janji-janji yang tidak ditepati semakin

memperkuat sikap apatis dan skeptis di kalangan mahasiswa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang dalam Pilkada Gubernur di Sumatera Barat. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana akses yang semakin mudah terhadap berbagai informasi terkait pilkada, terutama melalui media sosial dan internet, memengaruhi partisipasi politik mahasiswa. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari salah satu dosen Ilmu Administrasi Negara, Ibu Dr. Nora Eka Putri, S.IP., M.Si., yang dalam wawancara pada tanggal 23 Maret 2025 menyampaikan bahwa:

*".... Saya melihat bahwa partisipasi politik mahasiswa saat ini cukup meningkat, terutama dengan adanya akses informasi yang lebih mudah melalui media sosial dan internet. Mahasiswa sekarang lebih aktif mengikuti perkembangan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun, saya juga melihat bahwa meskipun mereka terlibat, pemahaman mereka terkadang masih terbatas. Banyak yang terjebak pada opini umum atau informasi yang belum terverifikasi, yang bisa memperburuk polarisasi di kalangan mereka."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan partisipasi politik mahasiswa yang didukung oleh kemudahan akses informasi, masih terdapat tantangan besar terkait kualitas pemahaman politik di kalangan mereka. Informasi yang belum diverifikasi dan opini yang berkembang secara tidak kritis berpotensi memicu polarisasi yang semakin tajam di lingkungan kampus dan masyarakat luas.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, khususnya terkait dengan partisipasi politik mahasiswa dalam Pilkada 2024, penulis merasa terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang berperan dan terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bentuk partisipasi politik mahasiswa, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta tantangan yang dihadapi agar dapat

memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan pendidikan politik dan peningkatan partisipasi politik mahasiswa di masa mendatang.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif dengan metode Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena peneliti berupaya menggambarkan kondisi atau situasi yang terjadi di lapangan secara apa adanya, tanpa melakukan modifikasi atau penambahan terhadap objek atau subjek penelitian. Penelitian Kualitatif merupakan proses penelitian yang digunakan untuk mengetahui fenomena- fenomena yang terjadi pada manusia dan makhluk sosial lainnya dengan cara menggambarkan secara keseluruhan dengan menggunakan kata-kata, menggambarkan pandangan secara detail terkait sumber yang didapatkan dari informan, dan dilakukan dengan dengan sebenar-benarnya. Pendekatan ini dilakukan secara sistematis dan akurat, dengan mengacu pada fakta-fakta yang benar-benar terjadi serta sesuai dengan realitas di lapangan. Metode deskriptif memberikan peluang bagi peneliti untuk mengumpulkan data secara komprehensif dari berbagai sumber, seperti wawancara, catatan lapangan, foto dokumentasi, dokumen pribadi, maupun dokumen resmi. Informan dalam penelitian ini mencakup dari mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara serta Dosen dari departemen Ilmu Administrasi Negara. Semua data tersebut kemudian diolah untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai objek penelitian, sehingga hasilnya dapat merepresentasikan keadaan yang sebenarnya serta membantu memahami fenomena yang sedang diteliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Partisipasi politik mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang dalam Pilkada Gubernur Sumatera Barat 2024 menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran krusial dalam memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pemilih pasif, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam ranah sosial dan politik. Bentuk partisipasi mereka terbagi menjadi dua kategori, yaitu partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif, yang meliputi kritik konstruktif dan pengajuan usulan kebijakan, memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas

demokrasi. Namun, hasil yang di temukan minat mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam proses politik masih relatif rendah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurang optimalnya pendidikan politik yang mereka terima serta maraknya informasi palsu atau hoaks yang beredar luas di media sosial, yang dapat menimbulkan kebingungan dan apatisme.

Perkembangan modernisasi dan kemajuan teknologi digital menjadi faktor utama yang memengaruhi pola partisipasi politik mahasiswa saat ini. Media sosial membuka ruang baru bagi mahasiswa untuk mengakses serta menyebarkan informasi politik secara cepat dan luas. Walaupun hal ini memberikan dampak positif dengan memperluas akses informasi, modernisasi juga membawa tantangan baru, seperti penyebaran hoaks, polarisasi opini, serta kecenderungan mahasiswa hanya menjadi konsumen pasif tanpa keterlibatan kritis. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan strategi edukasi politik yang kuat dari institusi pendidikan dan pemerintah guna meningkatkan kualitas partisipasi politik mahasiswa sekaligus menangkal dampak negatif dari digitalisasi informasi.

Selain itu, perubahan struktural juga dapat dilihat dari peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam forum-forum diskusi politik dan proses pengambilan kebijakan di tingkat kampus. Namun, sejumlah kendala administratif masih menjadi hambatan, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah sehingga mengalami kesulitan untuk ikut memilih dalam Pilkada. Lebih jauh, partisipasi politik mahasiswa saat ini seringkali dipengaruhi oleh tren sesaat dan bukan oleh kesadaran ideologis yang mendalam, yang disebabkan oleh kurangnya wadah edukasi politik yang berkelanjutan dan sistematis. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya pembaruan kebijakan kampus dan pemerintah agar tercipta ruang-ruang partisipasi politik yang inklusif, konsisten, dan mendidik.

Penyebaran ide demokrasi di lingkungan kampus juga berfungsi sebagai sarana penting dalam membentuk kesadaran mahasiswa terhadap hak-hak politik mereka. Berbagai kegiatan pendidikan politik, baik yang bersifat formal melalui mata kuliah maupun nonformal melalui organisasi kemahasiswaan, menjadi media efektif untuk mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai demokrasi. Meskipun demikian, efektivitas kegiatan seperti seminar masih terbatas oleh kompleksitas materi yang

sulit dipahami oleh sebagian mahasiswa. Hal ini menegaskan pentingnya penyajian materi politik yang lebih komunikatif, sederhana, dan relevan dengan konteks mahasiswa agar dapat diterima dan diaplikasikan secara maksimal.

Secara keseluruhan, partisipasi politik mahasiswa UNP dalam Pilkada Gubernur Sumatera Barat 2024 mencerminkan kemajuan positif, namun masih memerlukan banyak perbaikan dan penguatan. Sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi kemahasiswaan sangat dibutuhkan untuk menciptakan program pendidikan politik yang berkelanjutan dan berkualitas. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan partisipasi politik mahasiswa tidak hanya bersifat formalitas semata, tetapi juga menjadi partisipasi yang substantif dan berpengaruh dalam proses demokrasi yang sehat dan inklusif dengan adanya pendidikan politik yang memadai, mahasiswa dapat berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus menjadi penggerak perubahan sosial dan politik yang lebih progresif di masa mendatang. Pendidikan politik yang baik akan membekali mereka dengan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya keterlibatan aktif dalam proses politik.

Partisipasi politik mahasiswa dalam Pilkada Gubernur Sumatera Barat 2024 mencerminkan keterlibatan generasi muda yang semakin aktif dalam merespons dinamika dan persaingan antar elit politik. Konflik antar kelompok elit politik bukan lagi dianggap sebagai persoalan semata yang merugikan, melainkan juga sebagai sebuah momentum untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan peran penting mereka dalam demokrasi. Dalam konteks ini, mahasiswa tidak hanya sekadar menjadi pemilih yang memberikan suara, melainkan juga sebagai agen perubahan yang berupaya menegakkan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta integritas melalui pengawasan dan partisipasi kritis terhadap proses politik yang berjalan.

Walaupun mahasiswa tidak selalu terlibat langsung dalam konflik yang terjadi antar kelompok elit politik, mereka memainkan peranan signifikan dalam mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh polarisasi yang sering kali muncul dalam situasi politik. Keterlibatan mereka tampak nyata dalam berbagai aktivitas seperti mengikuti

kampanye, mengadakan diskusi politik, serta memberikan penyuluhan literasi politik kepada warga. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa partisipasi politik mahasiswa bukan hanya sebatas formalitas, tetapi lebih bersifat substantif karena mereka aktif mengawal dan memastikan proses Pilkada berjalan dengan jujur dan adil, bahkan setelah pemungutan suara berlangsung, guna menjamin akuntabilitas hasil pemilihan.

Menurut pandangan para ahli seperti Almond, Huntington, dan Meyner, partisipasi politik mahasiswa ini bukan sekadar tanda kepedulian terhadap hasil pemilu, tetapi juga sebuah bentuk keterlibatan yang mampu memengaruhi kebijakan publik. Hal ini menegaskan posisi strategis mahasiswa sebagai aktor perubahan yang memperjuangkan kebijakan demokratis dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

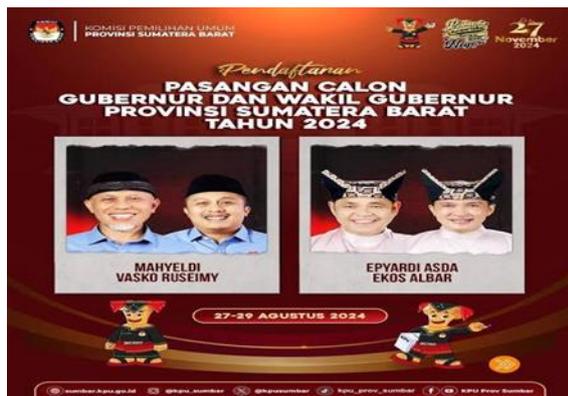
Dalam konteks ini, sasaran utama partisipasi politik yang ingin dicapai adalah mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Partisipasi mereka dapat dianalisis melalui faktor-faktor yang memengaruhi perilaku politik, sebagaimana dijelaskan oleh Myron Weiner dalam karya Ridestian (2020). Faktor-faktor tersebut meliputi berbagai aspek yang memengaruhi intensitas dan kualitas keterlibatan politik mahasiswa, yang akan menjadi fokus kajian lebih mendalam dalam penelitian ini.

### **Pengaruh Modernisasi terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa**

Modernisasi, sebagai sebuah proses perubahan sosial yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan, telah memberikan dampak besar terhadap pola partisipasi politik mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Dengan kemudahan akses informasi melalui media sosial dan internet, mahasiswa kini dapat memperoleh, menyebarkan, dan merespons informasi politik secara lebih cepat dan efisien. Hal ini membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan interaktif, sehingga meningkatkan kesadaran serta keterlibatan mereka tidak hanya dalam politik kampus, tetapi juga dalam dinamika politik di tingkat daerah.

Meski demikian, modernisasi juga membawa sejumlah dampak negatif yang perlu menjadi perhatian. Salah satu dampak tersebut adalah maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks, yang dapat memicu polarisasi serta

fragmentasi di kalangan mahasiswa. Situasi ini menghambat terjadinya dialog politik yang sehat dan konstruktif. Selain itu, kemudahan akses informasi digital terkadang membuat mahasiswa cenderung pasif dalam forum-forum politik formal, di mana mereka lebih sering berperan sebagai konsumen informasi daripada sebagai pelaku aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Kondisi ini menandakan adanya tantangan baru dalam mengoptimalkan peran mahasiswa dalam partisipasi politik yang substantif di era modernisasi.



Gambar 2. Digitalisasi Pilkada Gubernur Sumbar 2024

Temuan di lapangan mengungkapkan bahwa partisipasi politik mahasiswa paling banyak terealisasi melalui media sosial. Oleh karena itu, sangat penting adanya upaya edukasi politik yang berkelanjutan dan terencana dari pihak kampus maupun pemerintah. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi politik mahasiswa, membekali mereka kemampuan menyaring informasi secara kritis, sekaligus mendorong partisipasi yang bertanggung jawab dan bermartabat. Dengan pendekatan seperti ini, modernisasi tidak hanya menjadi sumber tantangan atau konflik, melainkan dapat berperan sebagai sarana pemberdayaan politik yang efektif bagi mahasiswa dalam menjalankan peran sosial-politiknya.

### Perubahan Struktural dalam Pola Partisipasi Politik Mahasiswa

Perubahan struktural ini menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan dalam pola partisipasi politik mahasiswa menjadi lebih aktif dan inklusif. Mahasiswa kini semakin terlibat dalam berbagai forum diskusi, turut ambil bagian dalam proses perumusan kebijakan, serta berperan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan

mereka, baik di tingkat kampus maupun dalam ranah politik daerah.

Namun demikian, keterbukaan informasi yang masif melalui media sosial juga menimbulkan fenomena FOMO (*Fear of Missing Out*), di mana sebagian mahasiswa cenderung mengikuti opini mayoritas tanpa pemahaman yang mendalam. Kondisi ini menyebabkan kualitas partisipasi politik mereka belum mencapai tingkat optimal. Di samping itu, terdapat kendala teknis, seperti keterbatasan hak pilih yang disebabkan oleh domisili mahasiswa, sehingga kontribusi politik mereka secara formal, terutama dalam Pilkada Gubernur Sumatera Barat 2024, masih terbatas.

Minimnya edukasi politik yang berkelanjutan juga berkontribusi pada sifat partisipasi mahasiswa yang cenderung temporer dan mudah terpengaruh tren sesaat, bukan karena kesadaran ideologis yang matang. Meski demikian, observasi lapangan menunjukkan adanya partisipasi aktif mahasiswa dalam forum diskusi online mengenai kebijakan dan politik, yang menggambarkan perubahan struktural yang positif. Namun, hal ini tetap memerlukan peningkatan kualitas melalui edukasi politik yang lebih terarah dan inklusif.

Karenanya, peran kolaboratif antara pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi mahasiswa menjadi sangat penting untuk menciptakan ruang diskusi politik yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan teknis pemilu juga perlu dilakukan agar partisipasi mahasiswa bisa menjadi inklusif secara nyata dan bermakna bagi perkembangan demokrasi di daerah.

### Penyebaran Ide Demokrasi

Penyebaran ide demokrasi di lingkungan kampus merupakan fondasi penting dalam membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang tidak hanya memahami hak-hak politiknya, tetapi juga menyadari tanggung jawabnya dalam memperkuat sistem demokrasi. Kampus, dalam hal ini Universitas Negeri Padang, memiliki posisi strategis sebagai arena awal pembelajaran nilai-nilai demokratis, karena di dalamnya terjadi proses sosialisasi politik yang intensif, baik secara langsung melalui kurikulum maupun secara tidak langsung melalui aktivitas kemahasiswaan.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, kampus berfungsi layaknya miniatur masyarakat, di mana mahasiswa dapat berlatih menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan

sehari-hari. Pendidikan politik formal melalui mata kuliah seperti pendidikan kewarganegaraan, sistem politik Indonesia, dan ilmu pemerintahan menjadi jalur utama penyampaian nilai demokrasi secara akademik. Sementara itu, pendidikan nonformal yang diperoleh melalui organisasi kemahasiswaan, seminar, pelatihan, hingga forum diskusi membuka ruang yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam memahami serta menerapkan konsep demokrasi secara langsung.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial turut memperkuat proses penyebaran ide demokrasi. Platform digital menyediakan ruang partisipatif yang memungkinkan mahasiswa untuk mengakses informasi politik secara cepat, mengikuti dinamika kebijakan publik, menyampaikan kritik terhadap pemerintah, serta terlibat dalam diskusi terbuka dengan berbagai kalangan. Media sosial juga memudahkan penyebaran gagasan demokrasi lintas wilayah dan latar belakang, sehingga memperluas jangkauan literasi politik mahasiswa.

Namun demikian, penyebaran ide demokrasi melalui media sosial juga menuntut kesiapan mahasiswa dalam menyaring informasi dan memahami konteks politik secara kritis. Tanpa pendampingan edukatif yang memadai, mahasiswa rentan terjebak dalam penyebaran informasi yang bias atau bahkan hoaks, yang dapat merusak semangat demokrasi itu sendiri.

Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan tinggi untuk memperkuat peran dan kualitas pendidikan politik yang diberikan kepada mahasiswa. Hal ini tidak hanya untuk membekali mereka dengan pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam berdemokrasi secara sehat, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penyebaran ide demokrasi di lingkungan kampus akan berfungsi sebagai pondasi kokoh dalam menciptakan generasi muda yang mampu menjaga serta mengembangkan demokrasi di Indonesia secara berkelanjutan.



**Gambar 3. Bedah Visi Misi calon Gubernur Sumbang 2024 di kampus UNP**

Namun, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat tantangan signifikan dalam proses penyampaian materi edukasi demokrasi yang cenderung kompleks dan kurang mudah dipahami oleh sebagian mahasiswa. Materi yang terlalu teoretis atau bersifat abstrak seringkali menjadi kendala dalam menjangkau mahasiswa dengan latar belakang pemahaman yang beragam. Akibatnya, upaya pembentukan kesadaran demokratis menjadi kurang efektif, terutama bagi mahasiswa yang belum memiliki ketertarikan atau dasar pengetahuan politik yang kuat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendekatan edukasi politik perlu dirancang ulang agar lebih komunikatif, sederhana, dan kontekstual. Penggunaan metode yang interaktif seperti simulasi pemilu, diskusi terbuka, role play kebijakan publik, serta penyajian materi melalui media visual dan digital dapat membantu mahasiswa memahami prinsip-prinsip demokrasi dengan cara yang lebih menarik dan aplikatif. Materi edukasi juga sebaiknya dikaitkan dengan isu-isu aktual yang relevan dengan kehidupan mahasiswa, agar mereka merasa lebih terhubung secara emosional dan intelektual.

Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan seperti bedah visi-misi calon Gubernur Sumatera Barat, keterlibatan dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan forum diskusi politik menunjukkan bahwa penyebaran ide demokrasi sudah mulai berjalan dan diterima di kalangan mahasiswa. Kegiatan ini mencerminkan adanya ruang praktik demokrasi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam proses politik.

Pengalaman ini sangat penting sebagai bentuk pembelajaran aktif dalam demokrasi.

Untuk memperkuat hal tersebut, dibutuhkan pendidikan politik yang terstruktur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sinergi antara institusi pendidikan tinggi, organisasi kemahasiswaan, serta pemanfaatan media digital menjadi kunci utama dalam membangun budaya demokrasi yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada penguatan partisipasi politik generasi muda. Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan mahasiswa yang tidak hanya paham secara teoritis, tetapi juga memiliki komitmen untuk turut serta menjaga dan memperkuat demokrasi di kampus maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Konflik Antar Kelompok**

Dalam konteks Pilkada Gubernur Sumatera Barat 2024, konflik antar kelompok elit politik memang menjadi salah satu dinamika yang mencolok. Namun, alih-alih menjadi sekadar penonton, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang justru menjadikan situasi ini sebagai momentum reflektif untuk menegaskan kembali posisi mereka sebagai bagian penting dari masyarakat sipil yang aktif dalam demokrasi. Konflik elit yang bersifat terbuka ini justru membangkitkan kesadaran kolektif mahasiswa untuk memahami pentingnya stabilitas politik, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan yang demokratis.

Mahasiswa tidak hanya menjadi pemilih dalam pesta demokrasi, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai agen perubahan dan pengawal demokrasi. Ini tercermin dalam berbagai aktivitas mereka seperti keterlibatan dalam kampanye politik berbasis nilai, diskusi publik, seminar tematik mengenai demokrasi dan pemilu, serta penyuluhan literasi politik yang ditujukan kepada masyarakat umum, khususnya pemilih pemula. Aktivitas ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya melek politik, tetapi juga memiliki kesadaran untuk mengedukasi lingkungan sosialnya agar tidak terjebak dalam arus polarisasi yang mengancam kohesi sosial.

Meskipun tidak terlibat langsung dalam konflik antara elit politik, mahasiswa mampu mengambil peran strategis sebagai penengah dalam membentuk opini publik yang lebih rasional dan objektif. Mereka menjadi garda terdepan dalam menangkal hoaks, ujaran kebencian, serta propaganda politik yang

cenderung manipulatif di media sosial. Mahasiswa menggunakan kapasitas intelektual dan akses terhadap teknologi informasi untuk menyaring dan menyebarkan informasi yang kredibel, sekaligus mengajak masyarakat untuk bersikap kritis terhadap dinamika politik yang berkembang.

Berdasarkan hasil observasi, keterlibatan mahasiswa dalam mengawal nilai-nilai demokrasi tidak bersifat reaktif, tetapi lebih pada partisipasi yang terorganisir dan reflektif. Mereka tidak sekadar menjalankan hak pilih, tetapi juga mengawasi jalannya proses demokrasi, mulai dari tahapan kampanye hingga pengawasan pascapemungutan suara. Ini menandakan adanya pergeseran kualitas partisipasi politik mahasiswa dari pasif ke aktif, dari simbolik ke substantif.

Dengan demikian, peran mahasiswa dalam konteks Pilkada 2024 bukan hanya sebagai bagian dari statistik pemilih muda, tetapi sebagai subjek aktif yang turut menentukan arah demokrasi ke depan. Keaktifan ini perlu terus didukung dengan ruang diskusi politik yang inklusif, pendidikan politik yang progresif, dan kolaborasi antara kampus, KPU, serta organisasi masyarakat sipil, guna memastikan mahasiswa tidak kehilangan idealisme dan tetap menjadi pengawal demokrasi yang kritis dan visioner.

### **Keterlibatan Pemerintah**

Perluasan peran pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan, menuntut keterlibatan aktif dari seluruh elemen warga negara. Dalam konteks ini, mahasiswa khususnya mereka yang berasal dari program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang memiliki posisi strategis yang tidak bisa diabaikan. Dengan latar belakang pendidikan yang fokus pada sistem pemerintahan, kebijakan publik, dan administrasi negara, mahasiswa ini dibekali dengan pemahaman teoritis dan praktis yang cukup untuk berkontribusi dalam dinamika politik lokal maupun nasional.

Dalam Pilkada Gubernur Sumatera Barat 2024, mahasiswa tidak hanya diposisikan sebagai pemilih semata, tetapi juga sebagai pengawas sosial dan agen perubahan. Peran ini menjadi penting karena mahasiswa memiliki kapasitas untuk membaca dan mengkritisi kebijakan, mengidentifikasi praktik politik yang tidak etis, serta menyuarakan aspirasi

masyarakat melalui jalur-jalur demokratis. Mereka juga diharapkan mampu mengedukasi publik, menyebarkan informasi politik yang objektif, dan mendorong terciptanya proses demokrasi yang transparan dan akuntabel. Aktivitas mahasiswa yang mencerminkan peran ini dapat ditemukan dalam bentuk keterlibatan mereka sebagai relawan pemilu, penggerak diskusi publik, penyelenggara forum debat kandidat, serta peserta aktif dalam kegiatan kampanye yang berbasis isu. Selain itu, keikutsertaan dalam organisasi kemahasiswaan yang fokus pada isu-isu politik dan kebijakan publik menjadi wadah penting bagi mahasiswa untuk membangun kapasitas analitis dan advokasi.

Dengan memanfaatkan media sosial, mahasiswa juga berperan dalam membentuk opini publik, mengarahkan narasi politik yang sehat, serta menangkal disinformasi yang kerap muncul menjelang pemilu. Partisipasi mahasiswa yang demikian ini bukan hanya mencerminkan keterlibatan politik dalam pengertian formal, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka telah menjadi bagian dari proses demokratis yang lebih luas — sebagai kontrol sosial terhadap elit politik dan sebagai penggerak kesadaran politik di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, keberadaan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara UNP dalam Pilkada Sumatera Barat 2024 dapat dipandang sebagai representasi dari potensi generasi muda yang sadar akan tanggung jawab politiknya. Untuk memaksimalkan peran tersebut, diperlukan dukungan institusional melalui program-program pendidikan politik yang berkelanjutan, serta kebijakan kampus yang mendorong partisipasi mahasiswa dalam berbagai aspek kehidupan demokrasi. Hal ini akan memperkuat kualitas demokrasi lokal dan mempersiapkan mahasiswa sebagai pemimpin masa depan yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan publik.



**Gambar 1. Dokumentasi Bawaslu go to kampus**

Partisipasi mahasiswa dalam ranah politik, khususnya pada momentum Pilkada Gubernur Sumatera Barat 2024, tidak hanya tercermin dari keikutsertaan mereka sebagai pemilih, tetapi juga melalui berbagai bentuk aktivitas yang lebih substansial. Kegiatan seperti diskusi politik, pengawasan pemilu, dan penyebaran informasi kepada masyarakat mencerminkan peran aktif mahasiswa dalam memperkuat kualitas demokrasi. Partisipasi ini menjadi indikasi bahwa mahasiswa bukan lagi sekadar objek dalam sistem politik, melainkan telah berkembang menjadi subjek yang memiliki kepedulian dan kontribusi nyata terhadap jalannya proses demokratis.

Salah satu bentuk partisipasi yang menonjol adalah kerja sama antara Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (BEM FIS) Universitas Negeri Padang (UNP) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang dalam kegiatan bertajuk “Bawaslu Go To Kampus”. Program ini menjadi contoh konkret bagaimana sinergi antara lembaga negara dan institusi pendidikan dapat menghasilkan bentuk edukasi politik yang efektif dan aplikatif. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan mengenai mekanisme pengawasan pemilu, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam proses penyadaran publik akan pentingnya pemilu yang bersih dan berintegritas.

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga kampus memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang partisipasi politik yang inklusif. Kolaborasi ini membangun kesadaran kolektif mahasiswa akan nilai-nilai fundamental demokrasi seperti transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Di sisi lain, kegiatan semacam ini memperkaya wawasan politik mahasiswa serta meningkatkan kapasitas

kritis mereka dalam merespons dinamika politik lokal dan nasional.

Lebih jauh, partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan pengawasan dan edukasi pemilu juga turut memperkuat legitimasi proses demokrasi di mata publik. Mahasiswa sebagai aktor netral dan kritis dapat menjadi jembatan antara penyelenggara pemilu dan masyarakat, serta mendorong terciptanya partisipasi masyarakat yang lebih luas dan berkualitas.

Dengan demikian, keberlanjutan program seperti “Bawaslu *Go To Kampus*” perlu dijadikan prioritas bersama antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan institusi pendidikan tinggi. Sinergi ini tidak hanya akan meningkatkan literasi politik mahasiswa, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi Indonesia yang berakar dari partisipasi warga negara yang sadar, aktif, dan bertanggung jawab.

## PENUTUP

Partisipasi politik mahasiswa dalam Pilkada Gubernur 2024 merupakan elemen penting dalam penguatan demokrasi, karena mereka memiliki potensi sebagai agen perubahan melalui pemberian suara, kampanye, dan penyebaran informasi politik; namun, rendahnya partisipasi akibat hoaks, kurangnya edukasi, dan kendala administratif menunjukkan perlunya peran aktif kampus dan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran politik mahasiswa melalui pendidikan politik yang komprehensif, baik di dalam maupun di luar kelas, agar mereka dapat terlibat secara bijak dan bertanggung jawab dalam proses politik serta mendorong terwujudnya demokrasi yang lebih sehat dan partisipatif.

Bentuk partisipasi politik mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara yaitu mencakup Mahasiswa berpartisipasi melalui Forum Diskusi Politik, mengikuti Seminar terkait membedah Visi misi calon Gubernur, sebagai pengawas jalannya Pilkada, serta menjadi Tim Sukses dari salah satu Paslon Gubernur, namun disisi lain Partisipasi Politik Mahasiswa juga dihadapkan pada tantangan teknis, seperti terbatasnya hak pilih akibat kendala Domisili. Mahasiswa yang berdomisili luar daerah pemilihan, seperti Kota Padang di Pilkada Gubernur 2024 tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, hal ini menjadi salah satu hambatan yang membatasi Partisipasi Politik Mahasiswa secara formal. Dan tantangan selanjutnya minimnya

wadah edukasi politik yang tersedia bagi mahasiswa. Edukasi politik masih bersifat musiman, biasanya hanya diselenggarakan menjelang Pemilu, akibatnya mahasiswa cenderung lebih aktif secara temporer dan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang sistem politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bobsuni, N., & Ma'ruf, M. F. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam (Studi Kasus Wisata Bukit Kapur Setigi, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik). *Publika*, 215–226. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p215-226>
- Evita, N., Prestianta, A. M., & Asmarantika, R. A. (2023). Patterns of Media and Social Media Use in Generation Z in Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi*, 7(1), 195–214.
- Freedman, A. L. (2000). *Political Participation and Ethnic Minorities : Chinese*
- Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, terj. Sahat Simamora (Jakarta: PT Bina Aksara, 1984), 325
- Gharaghani, M., Rezaei-Matehkolaei, A., Hardani, A. K., & Mahmoudabadi, A. Z. (2021). Pediatric candiduria, epidemiology, genotype distribution and virulence factors of *Candida albicans*. *Microbial Pathogenesis*, 160, 105173.
- Gurney, G. G. et al. 2016. “Participation in Devolved Commons Management: Multiscale Socioeconomic Factors Related to Individuals’ Participation in Community-Based Management of Marine Protected Areas in Indonesia.” *Environmental Science and Policy*. Volume 61: (hlm 212–20).
- Harold J Laski mendefinisikan masyarakat sebagai sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan bersama. Lih., Budiardjo, *Dasar-dasar...*, cetakan kedua, 34.

- Jain, R. K. Appendix L: Poland-Sri Lanka Agreements, 1955–2021. Poland and South Asia, 471.
- Milbrath, L. W. (1981). Political Participation. In S. L. Long, *The Handbook of Montesquieu* dikutip oleh Merphin Panjaitan. Logika Demokrasi: Rakyat Mengendalikan Negara (Jakarta: Permata Aksara, 2011), 112.
- Nurhaidah, S.N., Syafril, R., dkk. (2025). Komunikasi Politik. Mataram: CV. Al-Haramain Lombok. Political Behavior (pp. 197-240). New York: Plenum Perss.
- Van Deth, J. W. (2016). What is Political Participation. Oxford Research Encyclopedias, Politics.
- Pratama, A. F., Juwandi, R., & Bahrudin, F. A. (2022). Pengaruh Literasi Politik dan Informasi Hoax terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. *Journal of Civic Education*, 5(1), 11–24. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i1.662>
- Pratama, N. R., Wafa, I. A., Budi, D. S., Sutanto, H., Asmarawati, T. P., Barlian Effendi, G., & Wungu, C. D. K. (2022). Effectiveness of COVID-19 vaccines against SARS-CoV-2 Omicron variant (B. 1.1. 529): a systematic review with meta-analysis and meta-regression. *Vaccines*, 10(12), 2180.
- Prof. Dr. Aim Abdulkarim, M. P., & Dra. Neiny Ratnaningsih, M. P. (2012). Budaya Politik, Partisipasi Politik dan Demokrasi Sebagai Sistem Sosial Politik Indonesia. *Sistem Politik Indonesia*, 1.3.
- Ririn Tri Nurhayati, "The Influence of International Norms on Gender Equality in the Advancement of Women's Political Participation in Indonesia", dalam *Gender and Politics*, peny. Siti Hariti Sastriyani (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), 131-132.
- Rizki, S. (2017). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Nagari (Studi Kasus Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Syafril, R. (2020). Politik Dinasti dalam Pandangan Islam. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 4(1), 125-135.
- Syarif, M. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi Politik dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Walikota 2015 di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. *E-Journal Pemerintahan Integratif*, 4(4), 547–561. [http://www.ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2017/01/pin\\_ahkam\\_partisipasi\\_politik\\_01-12-17-02-48-36.pdf](http://www.ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2017/01/pin_ahkam_partisipasi_politik_01-12-17-02-48-36.pdf)
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.